

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar

Rahmad Nanda Nicola*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Nandanicola85@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of GRDP, capital expenditure, and population on local tax revenues in Banjar Regency and to determine what factors are the most dominant influencing local tax revenues in Banjar Regency. This type of research is quantitative research using secondary time series data. The research location is in the qBanjar Regency, and the data that has been obtained is then carried out with multiple linear regression analysis using SPSS 26. The results of this study indicate that partially, GRDP, capital expenditure, and population have a significant effect on local tax revenues in Banjar Regency, GRDP, spending Capital, and people have a substantial impact on local tax revenues in Banjar Regency and the most dominant variable affecting local tax revenues is population.

Keywords: GRDP; Capital Expenditure; Population; Local Taxes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, belanja modal, jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar serta untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder *time series*. Lokasi penelitian pada Kabupaten Banjar dan data yang sudah di peroleh selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten banjar, secara simultan PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten banjar dan variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Jumlah Penduduk.

Kata Kunci: PDRB; Belanja Modal; Jumlah Penduduk; Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah dinilai menjadi faktor yang sangat penting bagi pemerintah agar selalu bisa digunakan untuk membangun kemudian memperbaiki fasilitas dan layanan publik yang dinikmati oleh banyak masyarakat, oleh karena itu ketika fasilitas publik tersebut memadai bahkan sangat mumpuni, masyarakat pun akan lebih rajin dalam melakukan pembayaran pajak yang digunakan pemerintah untuk selalu menambah dan memperbaiki fasilitas publik yang sering digunakan masyarakat.

Mardiasmo (2013) mengemukakan bahwa pajak daerah ialah pajak yang diperoleh dan digunakan untuk membiayai urusan daerah sendiri yang terdiri dari pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Kabupaten Banjar menjadi daerah otonom sejak tahun 1956 dan diberi kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri termasuk penarikan pajak daerah. Secara geografis Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang luas dan tak lepas dari potensi wilayah yang sangat beragam, Kabupaten Banjar sendiri memiliki jumlah penduduk yang besar menduduki urutan kedua di Kalimantan Selatan setelah Banjarmasin.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya semakin baik menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar yang tiap tahun semakin membaik tidak lepas dari peran beberapa faktor seperti PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk.

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. PDRB memiliki beberapa sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor PDRB yang memiliki hubungan langsung dengan pajak daerah akan lebih memberi pengaruh terhadap pajak daerah tersebut. Sektor yang lebih banyak memberi pemasukan kepada penerimaan pajak daerah yaitu dari sektor sekunder dan tersier. Pada penelitian ini menggunakan PDRB sektor sekunder dan tersier karena pada sektor tersebut lebih banyak memberi sumbangsih kepada penerimaan pajak daerah.

Selain variabel PDRB yang memberikan pengaruh kepada penerimaan pajak daerah, variabel belanja modal juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah melalui dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang membuat pemerintah dapat merealisasikan belanja modal yang sudah dianggarkan untuk peningkatan pelayanan publik tersebut sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari membayar pajak secara langsung. Apabila pelayanan publik yang dirasakan Masyarakat sudah bisa dirasakan manfaatnya atau berkualitas, maka masyarakat pun tidak segan untuk membayar pajak yang diperuntukkan dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

Jumlah Penduduk merupakan sebuah indikator yang sangat penting bagi suatu negara. Pendapatan suatu daerah diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak. Dengan adanya penduduk, hal tersebut juga memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lewat pajak daerah.

Tabel 1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Banjar Tahun 2010-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	Besar Kontribusi (%)
2010	8.036	49.272	16,3
2011	16.334	96.801	16,87
2012	23.307	146.677	15,89
2013	36.108	190.829	18,92
2014	50.938	167.358	30,44

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	Besar Kontribusi (%)
2015	50.709	172.555	29,39
2016	61.380	189.854	32,33
2017	66.632	179.715	37,08
2018	72.022	189.442	38,02
2019	80.831	223.040	36,24
2020	76.884	206.230	37,28
2021	81.009	203.842	39,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2022

Penerimaan pajak daerah menjadi komponen penyusun dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar. Presentase kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar masih terbilang kecil yang belum mencapai angka 50% meskipun presentasinya setiap tahun relatif mengalami kenaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar dan meneliti faktor yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar.

PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hidayati, (2018) menunjukkan bahwa secara simultan jumlah penduduk, PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah dan secara parsial PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan namun inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Mispriyanti & Kristanti, (2017) mendapatkan hasil bahwa secara parsial PDRB dan tenaga kerja memberi pengaruh yang positif kepada penerimaan pajak namun inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tidak memberi pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aji & Nugroho, (2021) dengan hasil bahwa secara parsial PDRB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan namun jumlah industri dan kepadatan penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dan secara simultan PDRB, Inflasi, Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk Pajak Daerah Kota Semarang. Dan penelitian yang dilakukan Wadjudje dkk, (2018) dengan hasil belanja modal, jumlah wisatawan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi DKI Jakarta dan penelitian oleh Asy'ari, dkk (2020) dengan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif

dan signifikan sedangkan DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak daerah Kota Malang.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada pada ruang lingkup di Kabupaten Banjar yaitu dengan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yang bersumber dari publikasi BPS yang memuat mengenai Data PDRB, belanja modal, jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar dengan rentang analisa 2010-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen yang didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik yang menyediakan data tentang Kabupaten Banjar Data yang sesuai dengan kebutuhan dan diperoleh dalam bentuk tahunan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap hubungan variabel. Namun, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, agar memperoleh hasil yang baik, akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar variabel bebas sebagai estimator agar variabel terikat tidak bias.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak pada model regresi (Echo, 2016).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan Uji untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen atau variabel bebas dan Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Echo, 2016).

Uji Heterokedestisitas

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu uji regresi ada ketidaksamaan variance antara residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dan jika tidak terdapat masalah dalam uji heterokedastisitas maka model regresi dinyatakan baik (Echo, 2016).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode yang telah lalu (Echo, 2016)

Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah selesai melakukan uji asumsi klasik, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Yang menggunakan persamaan logaritma Natural sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 BM + \beta_3 P + e$$

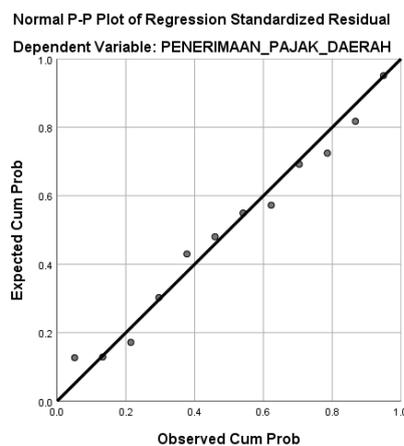
Dimana :

- Y : Penerimaan Pajak daerah (dalam satuan Juta Rupiah)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam satuan Juta Rupiah)
- BM : Belanja Modal (dalam satuan Juta Rupiah)
- P : Jumlah Penduduk (dalam satuan Jiwa)
- e : Error atau kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot



Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat jika titik-titik mengikuti pola diagonal yang artinya tidak menjauh dan tidak melebar, maka dapat disimpulkan bahwa pada Uji ini dapat dikatakan memenuhi atau tidak terjadi gejala normalitas dan untuk lebih meyakinkan lagi pada penelitian ini ditambah dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan apabila nilai Asymp.Sig Lebih dari 0,05 maka tidak terdapat masalah normalitas.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	249.618.503.405
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	-.090
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas nilai Asymp. Sig sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05 yang berarti tidak terdapat masalah normalitas.

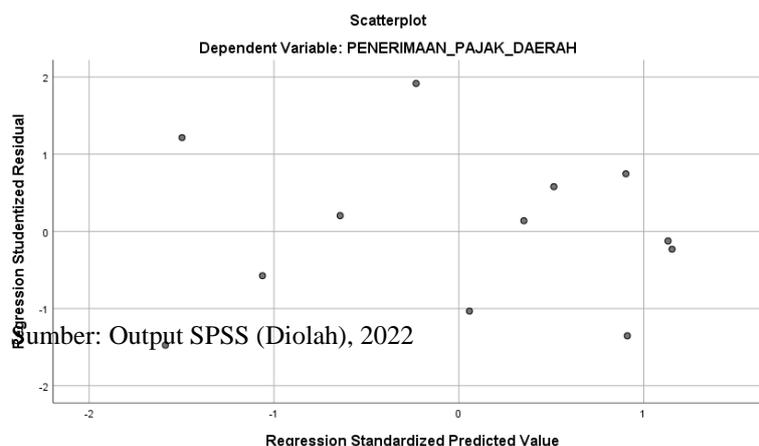
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PDRB	0.229	4.374
Belanja Modal	0.952	1.050
Jumlah Penduduk	0.225	4.438

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* pada Variabel PDRB, Belanja Modal dan Jumlah penduduk masing-masing memiliki nilai lebih dari 0,10 begitupun pada nilai VIF yang masing-masing nya juga memiliki nilai yang kurang dari 10.00. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedestisitas Grafik Scatterplot



Dapat dilihat pada gambar diatas terlihat bahwa persebaran titik menyebar di atas dan dibawah nilai nol (0) serta tidak terletak di satu bagian karena terletak di atas dan dibawah dan persebaran titik-titik tidak berpola, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedestisitas karena model regresi yang ideal dapat terpenuhi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Test Valuea	10.892.516
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	9
Z	.908
Asymp. Sig. (2-tailed)	.364

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi karena Nilai Asymp. Sig lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,364 maka sudah terpenuhi syarat untuk model regresi yang baik.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis regresi linear berganda

Model	B	Std. Error	t	Sig
(Constant)	-140.432,041	38.435,764	-3.654	0.006
PDRB	0.008	0.001	11.298	0.000*
BM	0.060	0.014	4.227	0.003*
P	0.207	0.080	2.590	0.032**

Keterangan :

* = Signifikan α 1%

** = Signifikan α 5%

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear diatas, maka didapat persamaan hasil sebagai berikut:

$$Y = -140.432,041 + 0.008PDRB + 0.060BM + 0.207P + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (C) memiliki nilai sebesar -140.4 Milyar yang menunjukkan apabila PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk sama dengan nol (0) atau tidak ada perubahan (konstan) maka variabel Pajak Daerah minus sebesar Rp -140.4 Miliar.
2. Koefisien PDRB memiliki nilai sebesar 0.008 hal tersebut berarti jika terjadi kenaikan pada PDRB sebesar 1 Juta Rupiah maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 8000

3. Koefisien BM dengan nilai sebesar 0.060 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan pada BM sebesar 1 Juta Rupiah maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.000
4. Koefisien P bernilai sebesar 0.207, artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel jumlah penduduk sebesar 1 Jiwa maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 207.000

Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 Juta pada PDRB dan Belanja Modal serta 1 Jiwa pada Jumlah Penduduk secara bersama-sama maka Pajak Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 275.000, sehingga menyebabkan nilai Y sebesar Rp. 134.568, dapat dilihat pada persamaan dibawah ini:

$$Y = -140.432,041 + 8.000 + 60.000 + 207.000$$

$$Y = 134.568$$

Uji koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R ²
1	.991

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan hasil Uji R² diperoleh nilai R² adalah sebesar 0,991 (99,1%), hal tersebut berarti bahwa variabel bebas atau independen mempengaruhi atau dapat menerangkan penerimaan pajak daerah sebesar 99,1% dan sisanya 0,9% dipengaruhi oleh diluar model.

Uji Parsial (T)

Tabel 7
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
PDRB	0.008	11.298	.000	Signifikan
BM	0.060	4.227	.003	Signifikan
P	0.207	2.590	.032	Signifikan

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat disimpulkan hasil pengujian secara parsial yakni sebagai berikut:

1. Produk domestik Regional Bruto (X1)
 Hasil pada PDRB pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung sebesar 11,298 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,008 yang berarti variabel PDRB ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021.
2. Belanja Modal (X2)
 Hasil pada variabel belanja modal pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung sebesar 4,227 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,060 yang berarti variabel belanja modal ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021.

3. Hasil pada variabel jumlah penduduk pada penelitian ini yaitu memiliki hasil T hitung sebesar 2,590 dengan nilai probabilitas sebesar 0,182 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,207 yang berarti variabel jumlah penduduk ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021.

Uji Simultan (F)

Tabel 8
Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	F	Sig.
1	37.512	0.000

Sumber: Output SPSS (Diolah), 2022

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti probabilitas $0.00000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat pengaruh secara bersama sama atau simultan dari Variabel yakni PDRB , Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini memiliki nilai konstanta yang negatif yaitu sebesar -140.432.041 yang artinya ketika variabel independen bernilai nol (0) atau tidak ada perubahan maka variabel Y minus sebesar -140.432,041 dan hal tersebut dikarenakan variabel independen berpengaruh positif atau memiliki hubungan yang lurus dalam kata lain tidak bertolak belakang yang mengartikan saat variabel independen naik variabel dependen juga naik. Ketika variabel independen 0 hal tersebut akan membuat variabel dependen menjadi minus karena tidak ada yang mempengaruhi variabel dependen, dalam kasus ini dijelaskan penerimaan pajak daerah menurun ketika PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk bernilai nol (0) karena tidak ada yang memberikan kontribusi pemasukan kepada Pajak daerah dan pajak daerah akan terus berkurang karena dipakai untuk membiayai pembangunan suatu daerah.

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil Uji T-Statistik dan koefisien pada Variabel PDRB diketahui bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dinyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti & Kristanti, (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo” dan Aji & Nugroho, (2021) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang” dengan hasil bahwa PDRB Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Meningkatnya PDRB tersebut menunjukkan pula adanya peningkatan pada perekonomian di suatu daerah tersebut yang akan meningkatkan pula pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Pendapatan faktor produksi yang meningkat tersebut menyebabkan kemampuan dalam membayar pajak juga meningkat karena masyarakat berada pada kesejahteraan yang memadai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saat sektor pembentuk PDRB naik, maka penerimaan pajak juga ikut naik. Sektor dalam PDRB yang memiliki hubungan lebih banyak dengan Pajak daerah adalah pada sektor sekunder dan tersier dan yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak daerah. Sektor pembentuk PDRB yang memiliki hubungan langsung sekaligus yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar ialah seperti konstruksi dan real estate memiliki hubungan dengan BPHTB dan PBB yang menjadi bagian dari pajak daerah. Dengan semakin banyaknya pembangunan konstruksi dan real estate maka akan membuat pajak daerah juga mengalami kenaikan. Dan seperti halnya akomodasi makan dan minum pun banyak menyumbang kepada pajak daerah melalui pajak hotel dan restoran di Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Susanto, (2014) yang berjudul “Analisis pengaruh PDRB, penduduk dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus Kota Malang tahun 1998-2012)” pada penelitian tersebut terdapat hasil bahwa pada sektor PDRB yang berupa hotel dan restoran memegang peran pajak restoran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang di dalamnya termasuk penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji T-statistik dan koefisien pada variabel belanja modal diketahui bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang linier dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Hal tersebut berarti ketika terjadi kenaikan pada belanja modal akan menaikkan pula Penerimaan Pajak Daerah.

Hal ini sejalan dengan teori wagner yang menyebutkan bahwa semakin lama kegiatan atau pengeluaran pemerintah terus meningkat dan ketika meningkat kualitas fasilitas publik semakin memadai dan semakin bernilai positif bagi masyarakat yang membuat masyarakat terdorong untuk membayar pajak. Ketika pemerintah melakukan pengeluaran dalam hal pembangunan dan fasilitas publik yang dibangun berkualitas dan berguna untuk menjalankan perekonomian maka membuat masyarakat terpacu untuk membayar pajak yang dipungut. Hal tersebut juga sesuai menurut Sukirno (1985) yang menyebutkan jika tingkat pengeluaran pemerintah yang di dalamnya ialah pembentukan modal dan pembangunan sarana dan prasarana maka akan memberi dampak pada lancarnya pembangunan ekonomi sehingga penerimaan pemerintah juga ikut meningkat. Selain itu pembangunan yang dilakukan pemerintah juga meningkatkan penerimaan pemerintah yang salah satunya didapat dari bertambahnya penerimaan pajak penerangan jalan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, (2020) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018” yang menyebutkan Belanja Modal berpengaruh positif dan Signifikan terhadap penerimaan

pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan oleh Wadjaudje, Dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta” dengan hasil Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Jumlah penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil Uji T-statistik dan koefisien pada variabel jumlah penduduk menghasilkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yang berarti semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan pajak daerah juga akan ikut meningkat. Dengan adanya hal tersebut berarti hasil dari variabel jumlah penduduk ini sesuai dengan hipotesis yang ditentukan.

Sejalan dengan teori Hansen yang menyebut jika jumlah penduduk semakin banyak akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah lewat permintaan agregat yang artinya akan membuat aktivitas perekonomian pada masyarakat meningkat karena penduduk banyak yang melakukan kegiatan perekonomian. Pada umumnya jumlah penduduk yang tinggi berada pada wilayah perkotaan namun tidak menutup kemungkinan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan penduduk yang tinggi pula, dan nyatanya Kabupaten Banjar menjadi Kabupaten dengan Penduduk terbanyak kedua di Kalimantan Selatan. Penduduk yang banyak tersebut juga akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja serta usia produktif dan akan menjadi faktor yang positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dengan usia produktif pada Kabupaten Banjar dengan presentasi melebihi setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Banjar. Banyaknya jumlah penduduk yang berada di usia yang produktif tersebut akan memacu kegiatan produksi, dan semakin banyak konsumsi dari penduduk tersebut yang akan menyebabkan munculnya permintaan agregat dan akan berdampak terhadap penerimaan daerah yaitu ke pajak daerah. Disisi lain dengan semakin banyaknya penduduk dengan usia produktif yang banyak maka akan juga meningkatkan jumlah subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak daerah.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Anis, (2020) dengan judul ” Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita Dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat” yang menghasilkan temuan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang tahun 1998-2013” dengan hasil jumlah penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang.

Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji F Statistik didapat hasil dari uji simultan yang menyebutkan bahwa PDRB, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,991 yang berarti

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,1 % dan 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil Uji hipotesis yang telah dilakukan dan pembahasan yang sudah di paparkan didapatkan hasil bahwa faktor atau variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk, hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk bernilai positif dan signifikan dengan Koefisien yang menjauh dari Nol yaitu sebesar 0.207.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengaruh PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: Pertama, secara parsial variabel PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Kedua, secara simultan variabel PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Ketiga, variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar, dan secara parsial semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dapat menjadi ukuran keberhasilan kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk mengembangkan penerimaan pajak daerah. Dengan hasil yang demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dapat dilihat bahwa PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan itu menjadi hal yang penting untuk dapat dijadikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk menentukan kebijakan atau cara untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjadi alat perencana untuk memprediksi besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. Dengan demikian pemerintah bisa mengetahui besarnya potensi penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan beberapa sektor dominan PDRB dalam memberikan sumbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dan juga dapat dengan mengunjungi wajib pajak secara langsung untuk memberikan arahan untuk tetap dan tepat waktu dalam membayar pajak serta mendata terhadap subjek dan objek pajak apabila belum terdata agar dapat menambah kontribusi terhadap pajak daerah, sehingga penelitian ini dapat

digunakan untuk referensi atau acuan untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk bisa bersinergi untuk menghadapi permasalahan yang sejenis terkait penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. B., & Nugroho. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang*. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(1), 1–12.
- Asy'ari Dkk. (2020). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang*. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(I), 1–13.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kependudukan*. Diambil 12 Juli 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Echo. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: LAB KOM MANAJEMEN FE UBB.
- Hidayati, S. D. (2018). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Permana*, IX(2), 74–86.
- Mangkoesebroto, G. (2013). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2017). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo*. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis* (hal. 219–233).
- MPR RI. *Undang-Undang No.10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (2021)*. Indonesia.
- Nasution, D. A. D. (2019). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Kebijakan)*. Jakarta: LPFE-UI & Bima Grafika.
- Suparno. (2012). *Hukum pajak*. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih.
- Wadjudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, & I. (2018). *Pengaruh belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2), 105–128.